



Songsong Porda 2022, Menyoal SDM Pengurus KONI Kota Jogja

PEKAN Olahraga Daerah (Porda) DIY bakal dihelat di Sleman pada 1-9 September mendatang. Bicara soal perolehan medali emas, KONI Kota Jogja punya sejarah kelam saat Porda 2019 lalu. Target juara umum tidak tercapai. Keadaan itu mendorong penulis mengadakan analisis. Sejaligus penelusuran enteng-entengan.

Salah satu faktornya 25 persen pengurus KONI diimpor dari kabupaten-kabupaten yang menjadi kompetitor Kota Jogja. Yang memprihatinkan penempatan wakil ketua III. Kapasitas dan kompetensinya patut dipertanyakan. Dari informasi yang diperoleh penulis pihak yang mengusulkan dan mempertahankan yang bersangkutan adalah istri wali kota periode lalu.

Posisinya kemudian disandingkan dengan bendahara yang juga masih ada hubungan famili. Baik wakil ketua III maupun bendahara berdomisili di kabupaten tetangga. Dalam pandangan penulis hal itu bisa menghambat program kerja KONI.

Sedikit ke belakang saat Porda 2019, KONI Kota Jogja dipimpin ketua umum Tri Djoko Susanto (TDS). Sama seperti bendahara, ketua umum dan sekretaris juga berdomisili di luar Kota Jogja. Kala itu dengan target juara umum, KONI Jogja digelontor Pemkot Jogja anggaran Rp 22 miliar. Sebagai tuan rumah yang mestinya punya kemudahan dalam akses tempat tanding Kota Jogja tumbang. Kalah dengan kabupaten tetangga yang anggarannya jauh lebih sedikit.

Torehan prestasi itu sungguh memprihatinkan. Padahal TDS menjadi ketua umum atas rekomendasi Haryadi Suyuti (HS), wali kota saat itu. Tak berapa lama kemudian TDS memilih mundur. Beruntung setelah TDS mengundurkan diri tak terdengar ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum (APH).

Dari catatan penulis, dari anggaran Rp 22 miliar ada yang dibelanjakan untuk barang dan jasa baik atlet maupun yang lainnya. Di antara belanja tersebut, patut diduga ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di antaranya

O l e h

(* Drs Sukanto

belanja barang Rp 700 juta. Ditengarai ada pengurus KONI yang membelanjakan sendiri. Tanpa melalui prosedur lelang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada APH di Kota Jogja yang tidak memeriksa TDS sehingga beliau tidak perlu bermasalah dengan hukum. Biarlah hal itu menjadi bagian dari sejarah.

Kembali kepada Porda 2022 DIY, penyangga keberhasilan mendapatkan medali berasal dari unsur pelaksana KONI yang bernama pembinaan prestasi. Lagi-lagi dalam bidang pembinaan prestasi itu ada yang impor dari tetangga kabupaten kompetitor Kota Jogja. Ternyata yang bersangkutan punya pengaruh yang sangat besar. Pertanyaan apa mungkin akan mengalahkannya daerah tempat tinggalnya?

Setiap unsur dalam kepengurusan KONI Kota Jogja yang berhubungan dengan peningkatan prestasi ada pengurus impor dari kabupaten yang menjadi kompetitor Kota Jogja. Penulis sangat yakin bila personel pengurus impor punya kompetensi keolahragaan yang istimewa, pasti mereka akan direkrut menjadi pengurus KONI Kabupaten setempat. Bahkan diajak bergabung ke KONI DIY.

Penulis kembali ingin bertanya apakah Kota Jogja sudah krisis SDM yang mampu mengelola KONI Kota Jogja sehingga harus mengimpor pengurus dari luar daerah setiap periode pengurus? Penulis juga mengimbau kepada Pemkot Jogja agar berhati-hati dan selektif dalam memberikan bantuan dana.

Lewat tulisan ini saya mengajak semua insan olahraga di Kota Jogja untuk bangkit dan bersatu. Kita kembangkan olahraga di Bumi Ngayogyakarta Hadiningrat yang kita cintai dan banggakan. Jayalah olahragawan, pelatih dan pelaku olahraga. Amin. **Salam Olahraga!**

Wirogunan, akhir Juni 2022
 *)Masyarakat Peduli
 Peningkatan Prestasi
 Olahraga Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005